

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau yang disingkat dengan UMKM merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mewujudkan stabilitas ekonomi nasional. UMKM dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan memperluas lapangan pekerjaan. Dengan meluasnya lapangan pekerjaan maka terjadi pemerataan ekonomi dan peningkatan pendapatan masyarakat. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KemenkopUKM) bulan Maret 2021, jumlah UMKM mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yaitu sebesar 61,07 persen. UMKM mampu menyerap 97 persen dari total tenaga kerja yang ada, serta dapat menghimpun sampai 60,42 persen dari total investasi di Indonesia. Gubernur Sumatra Selatan Herman Deru mengatakan saat ini jumlah UMKM yang ada di Sumsel itu mencapai 644.000 usaha (Wulandari, 2021: 2). Artinya jumlah UMKM yang ada di Sumsel hanya sekitar 1% dari total nasional.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), sektor UMKM menyumbang sekitar 60 persen dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Namun, jika dilihat dari data perbankan, kredit UMKM hanya berjumlah sekitar Rp 1.000 triliun atau 20 persen dari total kredit perbankan. Sementara, kredit perbankan di Indonesia hanya 39 persen PDB. Jadi, dikarenakan porsi UMKM hanya 20 persen dari total kredit, maka kredit UMKM hanya berkisar 8 persen PDB. Jika dilihat dari data tersebut tampaknya bank mengalami kesulitan dalam menyalurkan kredit kepada UMKM. Tidak tersedianya laporan keuangan menjadi salah satu kendala utama yang menghambat UMKM mengakses permodalan dari perbankan. Menurut Purba (2019: 56) “UMKM harus mampu menerbitkan laporan keuangan agar dapat lebih mudah untuk memiliki akses ke lembaga pemberi kredit”. Oleh karena

itu, perlu adanya solusi yang dapat mengentaskan masalah kekurangan modal bagi UMKM.

Semakin lama suatu usaha berdiri maka semakin besar pula keinginan pemilik usaha untuk mengembangkan usahanya. Tentunya pengembangan usaha tersebut tidak terlepas dengan kebutuhan akan modal yang lebih besar. Permodalan merupakan salah satu masalah utama yang sering dihadapi UMKM (Nuvitasari *et al*, 2019: 343). Minimnya modal yang dimiliki oleh para pelaku usaha menghambat kegiatan produksi sehingga keuntungan yang diperoleh tidak maksimal. Untuk itu, banyak pelaku usaha yang mengadu nasib dengan mencari modal melalui pinjaman bank. Sayangnya, syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan pinjaman modal dari bank seringkali tidak dipenuhi oleh para pelaku UMKM yang berakibat pada macetnya usaha.

Laporan keuangan merupakan suatu informasi yang mencerminkan keuangan suatu entitas atau organisasi yang dapat digunakan untuk menilai bagaimana kinerja entitas atau organisasi tersebut pada suatu periode tertentu (Purba, 2019: 344). Setiap perusahaan menggunakan laporan keuangan untuk mengetahui keadaan perusahaan selama periode tertentu. Baik itu perusahaan besar maupun menengah tidak terlepas dari kegiatan akuntansi untuk menghasilkan laporan keuangan. Menurut Mutiah (2019: 225), “Suatu perusahaan dapat dikatakan efektif dan efisien apabila perusahaan tersebut sudah menerapkan penyusunan laporan keuangan yang sudah sesuai dengan prosedur dan langkah yang telah ditetapkan dalam akuntansi”.

Uno (2019: 3889) menyebutkan bahwa pencatatan laporan keuangan menjadi hal yang penting untuk dilakukan oleh pelaku UMKM dikarenakan laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang menjadi bahan informasi bagi para pemakainya dan sebagai indikator untuk menunjukkan kesuksesan suatu usaha dalam mencapai tujuannya. Proses akuntansi akan memudahkan perusahaan untuk melihat kondisi perusahaan dan menilai kinerja perusahaan dalam suatu periode tertentu. Laporan keuangan juga digunakan sebagai alat pendukung UMKM dalam melakukan pengajuan kredit di Bank (Mutiah, 2019: 225). Ketiadaan laporan keuangan pada UMKM mengakibatkan

bank kurang berminat dalam memberikan pinjaman karena tidak memperoleh informasi keuangan yang memadai dari UMKM tersebut. Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan pencatatan akuntansi pada UMKM. Kegiatan akuntansi tentu sangat dibutuhkan dalam kegiatan UMKM sebagai tolak ukur bagi pemilik dalam menghitung keuntungan, mengetahui berapa tambahan modal, dan mengetahui bagaimana menyeimbangan hak dan kewajiban yang dimilikinya.

Melihat pentingnya penerapan akuntansi bagi UMKM dan dengan memperhatikan karakteristik transaksi UMKM, maka Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) di bawah naungan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menerbitkan satu standar akuntansi yang sesuai, yaitu SAK EMKM (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah) yang disahkan pada tahun 2009 dan sejak tanggal 1 Januari 2018 standar ini dinyatakan berlaku efektif. SAK EMKM adalah standar akuntansi untuk entitas yang tidak memiliki akuntabilitas kepada publik (IAI, 2018). Standar ini ditujukan untuk digunakan oleh entitas yang tidak atau belum mampu memenuhi persyaratan akuntansi yang ditetapkan dalam SAK ETAP. Dengan adanya standar ini maka perusahaan kecil dan menengah mampu menyusun laporan keuangannya untuk mendapatkan dana dan mengembangkan usahanya. Namun, keberadaan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) belum banyak diketahui oleh para pemilik usaha kecil dan menengah dan kurangnya sosialisasi menjadi faktor utama dalam kurangnya pemahaman tentang SAK EMKM di lingkungan UMKM.

Lapis OI merupakan usaha dagang yang bergerak di bidang penjualan makanan yang berlokasi di Kabupaten Ogan Ilir. Usaha ini merupakan *reseller* dari usaha yang memproduksi makanan khususnya di Ogan Ilir yang dapat dijadikan sebagai oleh-oleh dari Ogan Ilir. Lapis OI merupakan usaha dagang yang dimiliki oleh Bu Susi Andriani sejak tahun 2020. Berdasarkan survei awal dan wawancara langsung yang dilakukan penulis kepada pemilik usaha, Lapis OI belum memiliki laporan keuangan. Karyawan di Lapis OI hanya mencatat transaksi seperti pada umumnya yaitu transaksi penerimaan kas dan transaksi pengeluaran kas. Transaksi dicatat secara sederhana sehingga belum

melaksanakan penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM. Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh UMKM lapis OI seperti biaya operasional belum dicatat dengan benar dan jelas. Biaya-biaya tersebut yang sebenarnya telah dikeluarkan tetapi seringkali tidak terhitung dapat mengakibatkan sulitnya memperhitungkan laba/rugi yang diperoleh dan pemilik usaha hanya mengetahui perkembangan usahanya berdasarkan perkiraan saja. Hal ini disebabkan minimnya pengetahuan karyawan di UMKM Lapis OI tentang proses penyusunan akuntansi. Minimnya pengetahuan tersebut dapat membuat karyawan merasa kesulitan dalam melakukan pencatatan terhadap apa yang terjadi di perusahaan sehingga di UMKM Lapis OI sampai dengan saat ini belum ada penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan SAK EMKM. Sebagaimana Mutiah (2019: 225) yang menyatakan bahwa para pelaku UMKM belum sadar akan pentingnya laporan keuangan di suatu perusahaan karena keterbatasan informasi dan pengetahuan tentang akuntansi. Terbatasnya pengetahuan mengenai akuntansi ini juga menyebabkan UMKM lapis OI sulit memperoleh pembiayaan dari bank. Kondisi seperti ini dapat mempersulit UMKM dalam mengembangkan usahanya.

UMKM Lapis OI dalam menyusun laporan keuangan sebaiknya menerapkan SAK EMKM, karena SAK EMKM merupakan standar yang dibuat sederhana karena mengatur transaksi umum yang dilakukan oleh UMKM dan dasar pengukurannya murni menggunakan biaya historis sehingga UMKM cukup mencatat aset dan liabilitasnya sebesar biaya perolehannya (IAI, 2018). Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan yaitu belum adanya penyusunan laporan keuangan UMKM Lapis OI berdasarkan SAK EMKM yang berlaku serta melihat pentingnya penyusunan laporan keuangan tersebut pada UMKM Lapis OI, maka penulis mengambil topik Laporan Akhir dengan judul **“Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan SAK EMKM pada UMKM Lapis OI”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan dalam laporan akhir ini yaitu, bagaimana

penyusunan laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) pada UMKM Lapis OI?

1.3 Ruang Lingkup Pembahasan

Agar penulisan laporan akhir dapat terarah dengan baik dan menghindari pembahasan yang terlalu jauh dari pokok permasalahan, maka penulis membatasi permasalahan yang diutamakan mengenai penyusunan laporan keuangan UMKM yang meliputi, laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM dengan menggunakan bantuan aplikasi *Microsoft Excel*. Penulis mengambil transaksi penerimaan dan pengeluaran kas pada bulan Januari sampai dengan bulan Maret tahun 2021 di UMKM lapis OI.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan

1.4.1 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai penulis yaitu, untuk menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) pada UMKM Lapis OI yang dapat membantu pemilik mengetahui informasinya.

1.4.2 Manfaat Penulisan

Manfaat yang diharapkan dari penulisan laporan akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta pengaplikasian ilmu yang didapat selama perkuliahan untuk menyusun laporan keuangan perusahaan dengan menerapkan SAK EMKM.

2. Bagi Mahasiswa

Dapat dijadikan sebagai bahan pustaka, referensi, serta dapat membantu pembaca khususnya mahasiswa yang mempunyai minat untuk melakukan penelitian pada bidang atau tema yang sama khususnya mengenai penyusunan laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM).

3. Bagi Perusahaan

Sebagai saran atau masukan yang dapat digunakan untuk kemajuan dan pengembangan perusahaan dan sebagai sarana untuk memperluas eksistensi perusahaan.

1.5 Metode Pengumpulan Data

1.5.1 Teknik Pengumpulan Data

Penulis mengumpulkan data-data yang relevan yang akan digunakan dalam pembuatan laporan akhir ini. Menurut Sidiq dan Choiri (2019: 58) teknik pengumpulan data khususnya penelitian kualitatif adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

2. Observasi

Observasi adalah suatu metode pengumpulan data yang digunakan dengan jalan mengadakan pengamatan yang disertai dengan pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran yang dilakukan secara langsung pada lokasi yang menjadi objek penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian. Dokumen yang diteliti bisa berupa dokumen resmi seperti surat putusan, surat instruksi, sementara dokumen tidak resmi seperti surat nota, dan surat pribadi yang dapat memberikan informasi pendukung terhadap suatu peristiwa.

Penulis menggunakan teknik wawancara secara langsung kepada pemilik UMKM Lapis OI dalam pengambilan data. Selain itu, penulis juga menggunakan teknik observasi dan dokumentasi dengan mengumpulkan data yang diperoleh secara langsung dari UMKM Lapis OI berupa catatan keuangan tahun 2021.

1.5.2 Jenis Data

Data dapat dibedakan dalam beberapa jenis. Menurut Sidiq dan Choiri (2019: 165) berdasarkan siapa narasumbernya dan bagaimana data dikumpulkan data dapat dibedakan menjadi data primer dan data sekunder,

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh berdasarkan pengukuran secara langsung oleh peneliti dari sumbernya (subjek peneliti).

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain, dan telah terdokumentasikan, sehingga peneliti tinggal menyalin data tersebut untuk kepentingan penelitiannya.

Jenis data yang diperoleh penulis dari UMKM Lapis OI yaitu data primer berupa gambaran umum perusahaan dan catatan keuangan perusahaan tahun 2021. Catatan keuangan tersebut berupa catatan transaksi pengeluaran dan transaksi pemasukan.

1.6 Sistematika Penulisan

Secara garis besar Laporan Akhir ini terdiri dari 5 bab yang isinya mencerminkan susunan atau materi yang akan dibahas. Dimana setiap bab memiliki hubungan Untuk memberikan gambaran yang jelas berikut ini akan diuraikan mengenai sistematika pembahasan laporan akhir ini secara singkat yaitu:

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini akan menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, ruang lingkup pembahasan, tujuan dan manfaat penulisan, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini penulis akan mengemukakan teori-teori yang digunakan dalam melakukan perancangan dan pembahasan masalah. Teori-teori tersebut antara lain pengertian akuntansi, siklus akuntansi, prinsip akuntansi, pengertian laporan keuangan, jenis-jenis laporan keuangan, tujuan laporan keuangan, pengertian UMKM, jenis-jenis, asas, dan tujuan UMKM, SAK EMKM, pengakuan dalam laporan keuangan sesuai SAK EMKM, dan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM.

BAB III Gambaran Umum Perusahaan

Pada bab ini penulis akan menguraikan hal-hal yang berhubungan dengan UMKM Lapis OI yaitu mengenai sejarah singkat perusahaan,

struktur organisasi dan pembagian tugas, visi dan misi perusahaan, dan aktivitas perusahaan.

BAB IV Pembahasan

Bab ini berisi pembahasan tentang penyusunan laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) pada UMKM Lapis OI untuk transaksi pada bulan Januari sampai Maret tahun 2021.

BAB V Simpulan dan Saran

Bab ini merupakan bab penutup dari laporan akhir, dimana penulis akan memberikan suatu kesimpulan dari pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya, serta memberikan saran yang diharapkan akan bermanfaat bagi UMKM Lapis OI di masa yang akan datang.